

PERBEDAAN KONDISI KEBUTUHAN DAN KONDISI KONSENSUS TERHADAP NIAT PENGGELAPAN PAJAK

JRAK
8,2

105

Shaffera Kumalasari*, Bambang Subroto, Noval Adib

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 165, Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Email Koresponden: Vhe.meongmeong@gmail.com

Diterima:

07 Agustus 2018

Direvisi:

25 Oktober 2018

Disetujui:

29 Oktober 2018

Artikel ini tersedia di
website: [http://
ejournal.umm.ac.id/
index.php/jrak](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak)

Doi: 10.22219/
jrak.v8i2.30

Abstract

Based on the Taxation Performance Report for 2013-2016, the tax compliance ratio only ranges from 56.21% -63.15%. This study aims to examine the reasons why taxpayers have the intention of tax evasion by using conditions of need and consensus. This research used laboratory experimental method. The experimental design was 2x2 factorial design, which means two variables with two levels which means there are four designed conditions. This study used postgraduate students of the Faculty of Economics and Business majoring in Magister of Accounting, Magister of Management, and Magister of Economics in Universitas Brawijaya as the participants. Data analysis techniques used was two ways anova the application of IBM SPSS Version 23. The results proved that there were differences in conditions of high needs and low needs and there were differences in high consensus conditions and low consensus.

Keywords: Consensus, evasion, intention, need, tax

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan permasalahan serius yang menyebabkan hilangnya uang kas negara. Permasalahan penggelapan pajak berdampak pada lambatnya perkembangan negara dan menurunnya kesejahteraan rakyat (Mohamad, *et al.*, 2016). Di setiap lapisan masyarakat dengan berbagai macam kelas sosial, dan berbagai jenis profesi, serta segala bentuk industri tidak terlepas dari masalah penggelapan pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2014 sebesar 59,12%, pada tahun 2015 sebesar 60,42%, dan pada tahun 2016 sebesar 63,15%. Rasio kepatuhan ini diperoleh dari perbandingan wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan Surat SPT dibandingkan dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT.

Setiap wajib pajak secara terpaksa harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak, terkadang dalam menyisihkan dana pajak wajib pajak cenderung melaporkan seluruhnya atau sebagian atau sama sekali tidak melaporkan jumlah pendapatannya (Gabriel dan Roxana, 2012).

Hal yang mendasar menjadi alasan individu memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak karena faktor kebutuhan (Kaplan, Reckers, dan Roark 1988). Cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya yaitu dengan melakukan *tax evasion* atau *tax avoidance*. Walaupun keduanya memiliki makna yang sama dalam menghemat pajak, faktanya berbeda. *Tax evasion* ilegal, sedangkan *tax avoidance* legal (Ritsatos, 2014).

Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam perilaku penggelapan pajak jika beberapa anggota masyarakat lainnya diketahui juga terlibat dalam tindakan penggelapan pajak (Kaplan, 1988). Tingkat penggelapan di suatu wilayah juga menjadi alasan mendasar individu berniat melakukan tindakan penggelapan pajak. Ketika mayoritas penduduk melakukan tindakan penggelapan pajak, orang lain akan berfikir tidak adil kalau tidak terlibat juga (Weigel, Hessing, dan Elffers,



Jurnal Reviu Akuntansi
dan Keuangan

p-ISSN: 2615-2223

e-ISSN: 2088-0685

Vol. 8 No. 2, Oktober 2018

Pp 105-114

1987; Nhavira, 2016). Sebaliknya juga, lingkungan sekitar juga dapat memberikan dampak positif dengan mempengaruhi individu menjadi lebih patuh (Damayanti, Sutrisno, Subekti, dan Baridwan, 2015). Peran lingkungan sekitar sangat mempengaruhi wajib pajak dalam bertindak membuat keputusan perpajakan (Weigel *et al.*, 1987; Gcabo dan Robinson, 2007; Pickhardt dan Prinz, 2013; Khan dan Ahmad, 2014; Bidin *et al.*, 2014; Yadav, Ali, Anis, Tuladhar, 2015; Damayanti *et al.*, 2015; Damayanti *et al.*, 2016).

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori atribusi, teori motivasi, dan teori asosiasi diferensial. Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (1958) menyatakan dorongan individu melakukan sebuah tindakan didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari ciri, sifat dasar, kepribadian, dan minat individu, sedangkan faktor eksternal berasal lingkungan luar individu. Teori motivasi yang diperkenalkan oleh Maslow (1954:35) membentuk 5 (lima) hirarki kebutuhan manusia. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, teori asosiasi diferensial oleh Sutherland (1947) dalam Sutherland, Cressey, dan Luckenbill (1992) menjelaskan tindakan kejahatan yang dilakukan individu berasal dari proses belajar yang diperoleh dari lingkungan eksternal.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak yang menguji perilaku wajib pajak atas tindakan perpajakan, namun peneliti terdahulu lebih banyak menggunakan studi survei. Ada beberapa hal yang membenarkan wajib pajak bertindak menyimpang dari kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak dipandang dapat dibenarkan ketika alokasi dana pajak dipergunakan secara tidak adil, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak, perlakuan diskriminasi terhadap agama atau etnis tertentu, pengenaan tarif pajak terlalu tinggi sistem pajak tidak adil, dan masih banyak alasan lainnya (Fagbemi, Uadiale, dan Noah, 2010; Nhavira, 2016; Obeid, 2015; Mitu, 2016). Kemungkinan lain penyebab wajib pajak enggan membayar pajak karena peraturan pajak yang berbelit dan susah dipahami. Perilaku kepatuhan pajak juga akan meningkat jika wajib pajak memiliki kepercayaan pada otoritas pajak (Damayanti *et al.* 2015; Faizal, Palil, Maelah, Ramli, 2017). Karena timbulnya penggelapan pajak berasal dari kekecewaan wajib pajak (Webb dan Hussain, 2010).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kaplan *et al.* (1988) menggunakan atribut konsensus dan kebutuhan. Hal ini dikarenakan penelitian Kaplan *et al.* (1988) menggunakan atribut yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan sekarang. Hasil dari penelitiannya Kaplan *et al.* (1988) kondisi kebutuhan yang tinggi berdasarkan tekanan keuangan wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak berniat melakukan tindakan penggelapan pajak. Pada kondisi kebutuhan tinggi menyebabkan wajib pajak mengambil keputusan terlibat dari perilaku penggelapan pajak (Muhrtala dan Ogundeji, 2013; Engida dan Basida, 2014). Sedangkan pada faktor konsensus, tidak cukup membuktikan atas niat perilaku penggelapan pajak (Kaplan *et al.*, 1988). Menurut Fisbein dan Middlestadt (1987) bahwasanya perilaku seseorang didasari oleh tingkah laku yang menonjol dan kepercayaan normatif sehingga cenderung mengalami perubahan seiring perubahan kondisi lingkungan, kepercayaan masyarakat, dan faktor-faktor eksternal lain. Hal ini berarti bahwa perilaku masyarakat secara umum bervariasi berdasarkan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau wilayah. Hal ini mendorong peneliti melakukan pengujian ulang dengan menggunakan Mahasiswa sebagai partisipan dalam penelitian eksperimen.

Penelitian ini bertujuan menguji untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan antara kondisi kebutuhan tinggi dan kondisi kebutuhan rendah terhadap niat penggelapan pajak. Penelitian ini juga untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan antara kondisi konsensus tinggi dan kondisi konsensus rendah terhadap niat penggelapan pajak.

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Kaplan *et al.* (1988). Hal lain yang memotivasi penelitian ini yaitu penelitian

ini yaitu penelitian serupa masih sangat jarang ditemui di Indonesia terutama yang menguji persepsi wajib pajak, khususnya tentang perilaku penggelapan pajak. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan metode *survey*. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian eksperimen.

Hipotesis pada penelitian ini meliputi :

- H₁: Ada perbedaan niat penggelapan pajak antara kondisi kebutuhan tinggi dengan kondisi kebutuhan rendah
- H₂: Ada perbedaan niat penggelapan pajak antara kondisi konsensus tinggi dengan kondisi konsensus rendah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimental. Jenis pendekatan eksperimen ini adalah studi kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Desain eksperimen ini merupakan eksperimen laboratorium yang dilakukan dalam lingkungan buatan atau diatur (Sekaran dan Bougie, 2016:167). Alasan utama menggunakan eksperimen laboratorium bahwa metode studi ini memungkinkan peneliti untuk memanipulasi variabel independen dan mengukur dampaknya terhadap variabel dependen, sementara semua variabel lain yang dapat mengacaukan hubungan dihilangkan atau dikendalikan. Untuk menguji pengaruh lingkungan eksternal, adalah logis untuk memanipulasi kebutuhan kebutuhan dan konsensus.

Subjek atau partisipan dalam penelitian menggunakan subjek pengganti dari subjek wajib pajak sesungguhnya yang dimanipulasi dengan menggunakan mahasiswa sebagai partisipan. Pembebanan subjek dalam penelitian ini adalah 30 orang mahasiswa Program Magister Akuntansi, Magister Manajemen, dan Magister Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam setiap kelompok.

Faktor kebutuhan dapat mengubah perilaku individu untuk mengambil keputusan dalam kondisi terdesak. Salah satu alasan penghindaran pajak berasal dari kondisi keuangan wajib pajak. Jika wajib pajak mengalami kesulitan keuangan ia akan lebih cenderung mencari jalan pintas untuk menghindari membayar pajak. Jika kebutuhan finansial tinggi, maka subjek pajak berada pada posisi masalah tekanan keuangan, dan sebaliknya jika kebutuhan financial rendah, maka subjek pada tidak berada dalam kondisi tekanan keuangan (Kaplan, 1988). Variabel ini dimanipulasi pada dua level, yaitu kebutuhan tinggi dan rendah. Informasi tentang kebutuhan tinggi bahwa partisipan dalam kondisi tekanan keuangan yang tinggi. Sedangkan informasi tentang kebutuhan rendah bahwa partisipan masih memiliki tambahan penghasilan untuk menutupi biaya-biaya tambahan. Instrumen dalam pengukuran variabel kebutuhan yang dikembangkan oleh teori kebutuhan Maslow (1954), Albrech *et al.*, dan Teori Atribusi oleh Heider (1948):

1. Faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar yang dapat menjelaskan sebuah kejadian
2. Individu mendahului kebutuhan fisiologisnya
3. Tekanan keuangan terjadi karena ketidakmampuan individu dalam mengelola keuangannya.

Konsensus ditentukan dari seberapa besar mayoritas menentukan sikap atas perilaku. Jika konsensus tinggi maka mayoritas atas perilaku penggelapan pajak tinggi, dan sebaliknya jika konsensus rendah maka mayoritas atas perilaku penggelapan pajak rendah (Kaplan, 1988). Variabel ini ditandai dengan 2 (dua) kasus pada dua level, yaitu konsensus tinggi dan konsensus rendah. Informasi tentang konsensus tinggi bahwa lingkungan tempat tinggal partisipan mayoritas

melakukan tindakan penggelapan pajak. Sedangkan informasi tentang konsensus rendah bahwa lingkungan tempat tinggal partisipan hanya sedikit yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Instrumen dalam pengukuran variabel konsensus yang dikembangkan oleh teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland (1947) dan Teori Atribusi oleh Heider (1948):

1. Faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar yang dapat menjelaskan sebuah kejadian
2. Tindakan penggelapan pajak dapat terjadi dari interaksi dengan lingkungan sekitar
3. Tindakan penggelapan pajak berasal dapat terjadi karena memiliki hubungan kedekatan yang sangat intim atau erat

Niat merupakan keinginan atau kecenderungan individu untuk melakukan sebuah perilaku. Hal yang mendasar menyebabkan individu berkeinginan melakukan sesuatu berasal dari dorongan faktor internal maupun eksternal (Jones dan Davis, 1965). Pengukuran variabel dependen niat penggelapan pajak menggunakan skenario situasi di mana responden harus menyatakan niat atas perilaku penggelapan pajak pada situasi tertentu. Dalam skenario tersebut, partisipan eksperimen diminta berperan seolah-olah sebagai seorang pegawai swasta atau wiraswasta pada sebuah perusahaan. Partisipan akan diberi *treatment* untuk mengetahui seberapa besar niat atas perilaku penggelapan pajak. Partisipan diminta membuat keputusan dengan skala lima poin seberapa besar keinginan untuk melakukan tidak penggelapan pajak tersebut yang akan dilaporkan (1= sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=sangat setuju, 5= sangat tidak setuju). Semakin tinggi skor maka semakin tinggi niat penggelapan pajak. Instrumen dalam pengukuran variabel niat penggelapan pajak menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Alleyne dan Haris (2017):

1. Kecenderungan ingin melakukan penggelapan pajak
2. Keputusan melakukan penggelapan pajak

Salah satu karakteristik yang penting dalam penelitian eksperimen yaitu manipulasi. Manipulasi merupakan kondisi yang sengaja di ciptakan agar perilaku partisipan berubah sesuai dengan harapan penelitian (Sugiyanto, 2009). Manipulasi dalam penelitian ini terdapat situasi atau kondisi pada subjek penelitian yang diadopsi dari Kaplan *et al.* (1988) untuk menguji dampak lingkungan eksternal terhadap niat penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan variabel konsensus dan kebutuhan.

Informasi yang disajikan dalam kasus pada kondisi konsensus tinggi adalah tingginya tingkat penggelapan pajak yang terjadi di suatu wilayah. Sebaliknya, kondisi pada konsensus rendah adalah rendahnya wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Informasi yang disajikan pada kondisi kebutuhan tinggi adalah adanya kebutuhan keuangan yang mendesak sehingga membuat tingginya tekanan keuangan. Sebaliknya, kondisi pada kebutuhan rendah adalah kebutuhan keuangan yang rendah karena adanya penghasilan sampingan.

Pengecekan manipulasi dibutuhkan guna memberikan respon atau reaksi terhadap manipulasi, subjek penelitian harus memahami atau menginterpretasikan manipulasi yang diterima. Format dalam cek manipulasi bervariasi, tergantung pada karakteristik sebuah penelitian. Jika hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara subjek pada manipulasi yang berbeda, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan. Jika hasil cek manipulasi banyak menunjukkan kegagalan subjek memahami manipulasi, maka peneliti akan sulit untuk membuat sebuah kesimpulan. Idealnya dalam studi keperilakuan, manipulasi diinternalisasikan oleh subjek. Jika level pemahaman belum diterima, maka level penghayatan tidak mudah diraih (Nahartyo, 2012:156).

Penelitian ini menggunakan desain faktorial yang secara simultan mengakomodasi penelitian atas pengaruh dua atau lebih variabel independen. Keunggulan desain faktorial dalam penelitian eksperimen dapat secara langsung menguji dua atau lebih variabel independen. Variabel independen yang disebut faktor dan masing-masing faktor memiliki paling sedikit 2 (dua) level (Nahartyo, 2012:99). Penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2, yaitu variabel kebutuhan dan konsensus. Berikut tabel desain faktorial penelitian eksperimen ini:

Kebutuhan	Konsensus	
	Tinggi	Rendah
Tinggi	Sel 1	Sel 2
Rendah	Sel 3	Sel 4

Tabel 1.
Desain faktorial
Kebutuhan dan
Konsensus

Peneliti meneliti niat penggelapan pajak dengan cara membagi partisipan ke dalam empat sel yaitu:

1. Sel 1 : Kondisi kebutuhan tinggi dan konsensus tinggi
2. Sel 2 : Kondisi kebutuhan tinggi dan konsensus rendah
3. Sel 3 : Kondisi kebutuhan rendah dan konsensus tinggi
4. Sel 4 : Kondisi kebutuhan rendah dan konsensus rendah

Penelitian dengan studi eksperimen dilakukan di gedung F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Prosedur eksperimen dimulai dengan pemberian penjelasan singkat tentang prosedur penugasan eksperimen oleh peneliti kepada subjek. Pelaksanaan eksperimen dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Penentuan Partisipan

Sebelum melakukan eksperimen, peneliti mendatangi kelas dan kemudian meminta kesediaan menjadi partisipan dalam eksperimen penelitian ini. Peneliti memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penelitian eksperimen dan prosedur penugasan dilakukan oleh partisipan selama eksperimen.

2. Tahap Pra Eksperimen

Pada Pra Eksperimen peneliti menyebarkan pertanyaan mengenai dasar-dasar perpajakan. Tujuan peneliti untuk mengetahui kemampuan dasar para partisipan tentang perpajakan.

3. Tahap Pelaksanaan Eksperimen

Subjek eksperimen diminta untuk membaca kasus yang diberikan oleh peneliti, kasus ini diadaptasi dari Kaplan *et al.* (1988) dan telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Selanjutnya partisipan diminta mengisi jawaban atas keputusan yang tepat dengan skala pengukuran yang tercantum dalam materi eksperimen. Selanjutnya subjek penelitian mengisi data demografis dan cek manipulasi subjek eksperimen yang berisi usia, jenis kelamin, dan pengalaman kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan	Konsensus	
	Tinggi	Rendah
Tinggi	7,77±1,59 (N=31)	5,69±1,59 (N=35)
Rendah	4,33±1,63 (N=30)	4,08±1,11 (N=36)

Tabel 2.
Hasil Statistik
Deskriptif

Hasil analisis deskriptif pada tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata kasus 1 (satu) pada kondisi kebutuhan tinggi dan konsensus tinggi yaitu sebesar 7,7742 lebih besar dibandingkan dengan kasus 2 (dua) kondisi kebutuhan tinggi dan konsensus rendah nilai rata-rata sebesar 5,6857. Selanjutnya pada kasus 3 (tiga) pada kondisi kebutuhan rendah dan konsensus tinggi yaitu sebesar 4,3333 lebih besar dibandingkan dengan kasus 4 (dua) kondisi kebutuhan tinggi dan konsensus rendah nilai rata-rata sebesar 4,0833. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak dalam kondisi kebutuhan tinggi dan konsensus tinggi memiliki niat penggelapan pajak yang lebih besar.

Tabel 3.
Hasil Uji *Two*
Ways Anova

Source	F	Sig
Corrected Model	41.697	.000
Intercept	1791.74	.000
Kebutuhan	95.222	.000
Konsensus	20.473	.000

Setelah asumsi normalitas data terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji hipotesis two ways anova. Hal ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan kondisi kebutuhan dan konsensus. Pada tabel diatas, membandingkan perbedaan antara kebutuhan tinggi dan kebutuhan rendah memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti ada perbedaan antara kondisi kebutuhan tinggi dan kebutuhan rendah terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Temuan dalam penelitian ini memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kaplan *et al.* (1986) dan Kaplan *et al.* (1988). Hal yang menyebabkan wajib pajak memiliki niat penggelapan menyimpang dari kewajiban perpajakan karena berada dalam kondisi kebutuhan yang tinggi (H1).

Pada tabel diatas, membandingkan perbedaan antara konsensus tinggi dan konsensus rendah memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti ada perbedaan antara kondisi konsensus tinggi dan konsensus rendah terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa **hipotesis kedua (H₂) diterima.**

Hal yang menyebabkan wajib pajak memiliki niat penggelapan pajak tergantung pada kondisi konsensus yang tinggi atau pun rendah di lingkungan sekitar mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan perpajakan. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaplan *et al.* (1986) dan Kaplan *et al.* (1988) bahwa tidak ada perbedaan niat penggelapan pajak pada kondisi konsensus.

Perbedaan Kondisi Kebutuhan Tinggi dengan Kondisi Kebutuhan Rendah terhadap Niat Penggelapan Pajak : Kondisi kebutuhan tinggi dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang di alami oleh wajib pajak dalam ketidakmampuan untuk mengatur keuangan pribadi. Wajib pajak memiliki penghasilan, tetapi sisa penghasilan kurang dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan kondisi kebutuhan rendah dalam penelitian adalah suatu kondisi yang dialami oleh wajib pajak yang tidak dalam kondisi tekanan keuangan yang tinggi. Pada kondisi kebutuhan rendah sisa penghasilan wajib pajak dapat digunakan oleh wajib pajak untuk membayar jumlah pajak yang terutang. Berikut dibawah ini ilustrasi dari kondisi kebutuhan tinggi dan kondisi kebutuhan rendah:

Penghasilan dalam Setahun	
Gaji Pak Hariyam	84.990.000
Jumlah Penghasilan	84.990.000
Pengeluaran dalam Setahun	
Biaya Kebutuhan Pokok	51.000.000
Biaya Kuliah Anak	7.000.000
Biaya Hutang Bank	28.500.000
Jumlah Pengeluaran	86.500.000
Total Penghasilan	(1.510.000)

Sumber : Kumalasari (2018)

111

Tabel 4.
Kondisi Kebutuhan
Tinggi

Penghasilan dalam Setahun	
Gaji Pak Hariyam	84.990.000
Pendapatan Istri Pak Hariyam	1.522.800.000
Jumlah Penghasilan	1.607.790.000
Pengeluaran dalam Setahun	
Biaya Kebutuhan Pokok	51.000.000
Biaya Kuliah Anak	7.000.000
Biaya Hutang Bank	28.500.000
Biaya Kebutuhan Salon	450.000.000
Jumlah Pengeluaran	536.500.000
Total Penghasilan	1.071.290.000

Tabel 5.
Kondisi Kebutuhan
Rendah

Pada kondisi kebutuhan tinggi niat penggelapan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kebutuhan rendah. Kondisi kebutuhan tinggi yang menyebabkan wajib pajak merasa tertekan secara ekonomi lebih banyak memutuskan berniat melakukan tindakan penggelapan pajak. Karena pada saat kondisi kebutuhan tinggi wajib pajak tidak mampu untuk membayar pajak yang terutang, sehingga niat penggelapan pajak wajib pajak cenderung lebih tinggi. Sebaliknya pada saat kondisi kebutuhan rendah niat penggelapan pajak wajib pajak lebih rendah. Wajib pajak tidak dalam kondisi keuangan yang sulit.

Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa ada perbedaan kondisi kebutuhan tinggi dan kebutuhan rendah persepsi wajib pajak terhadap niat penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) didukung atau diterima. Hasil hipotesis pertama (H1) membuktikan secara empiris bahwa ada perbedaan antara kondisi kebutuhan tinggi dengan kebutuhan rendah.

Kejadian atau peristiwa yang akan terjadi berasal dari faktor eksternal atau internal (Heider, 1958). Faktor eksternal merupakan desakan atau dorongan dari luar kendali wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak membuat suatu keputusan. Kondisi kebutuhan yang menyebabkan wajib pajak memiliki niat terhadap penggelapan pajak. Kondisi kebutuhan tinggi ini yang mendesak wajib pajak untuk memiliki niat penggelapan pajak. Namun, apabila kebutuhannya rendah niat penggelapan pajak yang ada dalam diri wajib pajak juga rendah. Penelitian ini secara teoretis memberikan dukungan terhadap teori atribusi, khususnya pada faktor eksternal.

Secara teroris juga, memberikan dukungan pada teori motivasi yang menjelaskan motivasi dari kebutuhan wajib pajak. Hal yang dijelaskan pada penelitian ini bahwa kebutuhan fisiologis individu harus terpenuhi sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maslow (1947) menyatakan kebutuhan fisiologis lebih dominan daripada kebutuhan lainnya, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain menjadi prioritas utama. Ketika memiliki kebutuhan tinggi wajib pajak cenderung memiliki niat yang lebih besar terhadap niat penggelapan pajak daripada yang memiliki kebutuhan rendah.

Tekanan keuangan pribadi memiliki dampak pada penggelapan pajak karena pada kondisi tekanan keuangan yang tinggi dihadapi wajib pajak mendorong untuk memprioritaskan apa yang harus dibayar pertama sebagai kebutuhan dasar kelangsungan hidup (makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain). Hal yang menyebabkan wajib pajak memiliki niat penggelapan menyimpang dari kewajiban perpajakan karena berada dalam kondisi kebutuhan yang tinggi.

Temuan dalam penelitian ini memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kaplan *et al.* (1988), Muhrtala dan Ogundeji (2013), dan (Engida dan Basida, 2014). Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kaplan *et al.* (1988) yang menganalisa hubungan teori atribusi dengan penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan mahasiswa pascasarjana dan anggota masyarakat sebagai partisipan dalam penelitian eksperimennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa niat penggelapan pajak pada kondisi kebutuhan tinggi lebih tinggi daripada niat penggelapan pajak pada kondisi kebutuhan rendah.

Kondisi konsensus tinggi dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang menggambarkan wajib pajak dalam bersosialisasi di lingkungan sekitarnya lebih banyak mendukung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Lingkungan keluarga, kantor, relasi, dan lain-lain yang lebih banyak melakukan tindakan penggelapan pajak mendorong wajib lebih banyak berniat melakukan tindakan penggelapan pajak. Kondisi konsensus rendah dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang menggambarkan wajib pajak dalam bersosialisasi di lingkungan sekitarnya lebih banyak yang tidak mendukung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Ilustrasi dari kondisi konsensus tinggi media-media massa di Kota Malang telah melaporkan bahwa frekuensi penggelapan pajak di Kota Malang sangat rendah dan rata-rata rekan kerja hariyam taat membayar pajak. Ilustrasi dari kondisi konsensus rendah media-media massa di Kota Malang telah melaporkan bahwa frekuensi penggelapan pajak di Kota Malang sangat tinggi dan juga rata-rata rekan kerja hariyam tidak membayar pajak.

Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa ada perbedaan kondisi konsensus tinggi dan konsensus rendah persepsi wajib pajak terhadap niat penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) didukung atau diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) membuktikan bahwa ada perbedaan antara kondisi konsensus tinggi dengan konsensus rendah. Pada kondisi konsensus tinggi niat penggelapan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi konsensus rendah. Kondisi konsensus tinggi yang menyebabkan wajib pajak lebih banyak berniat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dibandingkan dengan kondisi konsensus yang rendah.

Penelitian ini secara teoretis memberikan dukungan terhadap teori atribusi oleh Heider (1958), khususnya pada faktor eksternal. Faktor eksternal pada kondisi konsensus mendesak atau mendorong wajib pajak terhadap niat penggelapan pajak. Peran orang-orang terdekat sangat dominan mempengaruhi wajib pajak memiliki niat penggelapan pajak. Wajib pajak pada kondisi konsensus yang tinggi menyebabkan wajib pajak memiliki niat terhadap penggelapan pajak. Karena dorongan atau desakan yang terjadi pada lingkungan sekitar menyebabkan wajib pajak memiliki niat penggelapan pajak. Namun, pada kondisi konsensus rendah niat penggelapan pajak yang ada dalam diri wajib pajak menjadi lebih rendah.

Penelitian ini juga secara teoritis memberikan dukungan pada teori asosiasi diferensiasi oleh Sutherland (1947). Sutherland memiliki keyakinan bahwa tindakan jahat seseorang lahir karena proses belajar. Proses belajar tindakan kejahatan dipelajari dari lingkungan sekitarnya. Wajib pajak yang tinggal di lingkungan yang kondisi konsensusnya tinggi akan memiliki niat penggelapan pajak lebih tinggi. Pada kondisi konsensus yang tinggi, wajib pajak akan belajar melakukan tindakan penggelapan pajak dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya, niat penggelapan pajak wajib pajak rendah jika wajib pajak tinggal di lingkungan yang kondisi konsensusnya rendah. Pada kondisi konsensus yang rendah, wajib

pajak tidak mudah menemukan atau tidak menemukan pembelajaran tentang tindakan penggelapan pajak dari lingkungan sosialnya.

Temuan dalam hipotesis kedua memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Pickhardt dan Prinz (2013), Khan dan Ahmad (2014), Bidin *et al.* (2014), dan Yadav *et al.* (2015), serta Damayanti *et al.* (2015). Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pickhardt dan Prinz (2013) yang meneliti tentang perilaku penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat dipengaruhi dari interaksi dengan orang lain. Jika, fenomena penggelapan pajak tersebar luas, maka akan sulit untuk menegakkan hukum pajak. Hal yang menyebabkan wajib pajak memiliki niat penggelapan pajak tergantung pada kondisi konsensus yang tinggi atau pun rendah di lingkungan sekitar mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan perpajakan. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh dan Kaplan *et al.* (1988) bahwa tidak ada perbedaan niat penggelapan pajak pada kondisi konsensus.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi wajib pajak terhadap niat penggelapan pajak. Hasil temuan penelitian ini yang pertama, bahwa ada perbedaan persepsi wajib pajak pada kondisi kebutuhan tinggi dan kebutuhan rendah terhadap niat penggelapan pajak. Kedua, bahwa ada perbedaan persepsi wajib pajak pada kondisi kebutuhan tinggi dan kebutuhan rendah terhadap niat penggelapan pajak. Ketiga, bahwa ada hubungan simultan antara kebutuhan dan konsensus terhadap niat penggelapan pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan kondisi kebutuhan dan kondisi konsensus mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap niat penggelapan pajak.

Penelitian ini hanya berfokus pada faktor eksternal yaitu kebutuhan dan konsensus. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah faktor internal untuk menguji persepsi wajib pajak terhadap niat penggelapan pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan skenario kedua yang diadopsi dari jurnal Kaplan *et. al.* (1988) untuk meneliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alleyne, P. dan Harris T. 2017. "Antecedents of Taxpayers' Intentions to Engage in Tax Evasion: Evidence from Barbados". *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Vol 15 No. 1.
- Bidin, Z., Shamsudin, F. M., dan Othman Z. 2014. "Using Theory of Reasoned Action to Explain Taxpayer Intention to Comply with Goods and Services Tax". *International Journal of Business and Social Science*. Vol 5 No 1.
- Damayanti, T. W., Sutrisno T., Subekti I., Baridwan Z. 2015. "The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance." *Accounting and Finance Research*. Vol 4 No. 1.
- Engida, T. G. dan Baisa G. A. 2014. "Factor Influencing Taxpayer Compliance with the Tax System: An Empirical Study In Mekelle City, Ethiopia". *EJournal of Tax Research*. Vol 12 No. 2.
- Fagbemi O.T., Uadile O. M., dan Noah A. O. 2010. "The Ethics of Tax Evasion: Perceptual Evidence from Nigeria." *European Journal of Social Sciences*. Vol 17 No 3.
- Faizal. Palil. Maelah. Ramli. 2017. "Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia". *Kasetsart Journal of Social Sciences*.

- Gabriel dan Roxana. 2012. "The Evation Motivation, Reaction and Economic Reason. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, and Management Sciences*". Vol. 2 No. 1.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heider, F. 1958. *The psychology of interpersonal Relations*. United States of America.
- Jones, E.E. dan Davis K.E. 1965. "From Acts to Dispositions The Attribution Process in Person Perception. *Advances in experimental social*". Vol 2.
- Khan W. A. dan Ahmad P. F. 2014. "Causes of Tax Evasion in Pakistan: A case study on southern Punjab". *International Journal of Accounting and Financial Reporting*. Vol. 4 No. 2.
- Kaplan, S.E., Reckers, P. M. J, dan Roark S. J. 1988. "An attribution Theory Analysis of Tax Evasion Related Judgment". *Accounting, Organizations, and Society*. Vol. 13 No. 4.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.
- Maslow, A. H. 1948. "Higher" and "Lower" Needs. *The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*". Vol. 25 No. 2.
- Maslow, A. H. 1954. *Motivation and Personality*. Harper & Row, Publishers, Inc.
- Mitu, N.E. 2016. "Taxpayer Behaviour: Typologies and Influence Factors". *RSP*. Vol. 49.
- Mohamad A., Zakaria M. H., dan Hamid Z. 2016. "Cash economy: tax evasion amongst SMEs in Malaysia". *Journal of Financial Crime*. Vol. 23 No. 4.
- Muhrtala, T.O., dan Ogundeji M. 2013. "Professionals Persepective of Tax Evasion: Some Evidence from Nigeria". *Universial Journal of Accounting and Finance*. Vol 1 No. 2.
- Nahartyo, E. 2012. *Desain dan Implementasi Riset Eksperimen*. UPP STIM YKPM. Yogyakarta.
- Nhavira, J. D. G. 2016. "A Survey Of Attitudes To Tax Evasion By Part-Time Business Studies Students At The University Of Zimbabwe". *The Science Probe*. Vol. 4 No. 1.
- Obeid, A. 2015. "Perceptions of Taxpayers on Tax Compliance in Sudan. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*. Vol. 3 No. 5.
- Pickhardt, M. dan Prinz A. 2014. "Behavioral dynamics of tax evasion – A survey". *Journal of Economic Psychology*. Vol 40.
- Ritsatos, T. 2014. "Tax evasion and compliance; from the neo classical paradigm to behavioural economic, a review. *Journal of Accounting & Organizational Change*". Vol. 10 No. 2.
- Robbins, S. P. dan Judge T. A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business A Skill Building Approach: Seven Edition*. John Wiley and Sons Ltd. Britania Raya.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., Luckenbill, D. F. 1992. *Principle of Criminology: Eleventh Edition*. A Division of Rowman and Littlefield Publisher, Inc. England.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- Webb, J. dan Hussain J. G. 2010. "Developing an Understanding of Taxpayer Perceptions in an Economic Crisis". *Journal of Finance and Management in Public Services*. Vol 9. No. 2.
- Yadav, A. Ali M., Anis M., Tuladhar S. 2015. "Contribution of Income Tax and Effect on Revenue Generation in Nepal. *International Journal of Scientific Engineering Research*". Vol 6 No. 1.